

**STRATEGI MEMPERTAHANKAN OPINI WTP ATAS LAPORAN
KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Salatiga)**

Oleh:

Kusuma Isbi Rahmadani (NIM 145020301111059)

Dosen Pembimbing:

Dr. Lilik Purwanti, M.Si., CSRS., CSRA., Ak., CA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan berbasis akrual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yang pengumpulan datanya melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mempertahankan opini WTP dapat dilakukan melalui beberapa strategi yaitu komitmen pimpinan dan bawahannya, peningkatan pengelolaan barang milik daerah dan piutang, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembentukan tim, peningkatan teknologi informasi, serta peningkatan peran inspektorat sebagai auditor internal. Kendala yang dihadapi dalam mempertahankan opini WTP yaitu aplikasi SIAP yang belum optimal dan mutasi jabatan.

Kata Kunci : *Pemerintah Daerah, Strategi, Opini Audit, Komitmen Pimpinan*

ABSTRACT

This case study aims to determine the strategy of the Local government of Salatiga city to maintain their unqualified opinion ~~on for their~~ accrual-based financial report. This research uses qualitative approach ~~case study method~~ and collects its data through interviews. The results of this study indicate ~~that~~ maintaining unqualified opinion can be ~~conducted done~~ through several strategies; they are keeping i.e. the commitment of the leaders and their subordinates, ~~the enhancement~~ enhancing of the management of regional property and accounts receivables, ~~the improv~~ ingement of the quality of human resources, ~~assembling good the team~~ formations of teams, ~~the improv~~ ingement of information technology, and ~~the enhanc~~ ingement of the role of inspectorates ~~role~~ as internal auditors. The obstacles they have to face encountered in maintaining the unqualified opinion ~~i.e. are ineffective~~ SIAP applications ~~that have not been optimal~~ and employee ~~mutation~~ transfers.

Keywords: local government, strategy, maintain unqualified opinion, commitment of ~~The~~ leader

PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah merupakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disusun dengan menggunakan sistem tata kelola yang baik dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual (Afrarudin dan Kurniati, 2016). Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diperkenankan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. SAP merupakan pedoman untuk penyatuan persepsi penyusun, pengguna dan auditor (Sinaga, 2005 dikutip Herwiyanti et.al, 2017). Pedoman digunakan penyusun sebagai acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah harus disajikan secara wajar dan berkualitas (Puspitaningsih, 2017). Laporan keuangan dikatakan wajar jika bebas dari salah saji material. Penilaian wajar atau tidaknya laporan keuangan diberikan oleh auditor independen dalam bentuk laporan audit.

Pemberian opini audit diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor independen pemerintah dengan memberikan keyakinan kepada *stakeholder* atas kewajaran informasi yang disajikan oleh Pemerintah Daerah. pemberian opini oleh BPK dibagi menjadi 5 jenis opini meliputi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Bastian, 2006: 222). Opini WTP merupakan penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan yang menjamin bahwa informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku (Budiman, 2017). Manfaat yang didapat capaian opini WTP bagi Pemerintah Daerah sebagai bukti perwujudan keberhasilan atas tata kelola yang baik. Capaian opini WTP merupakan salah satu kriteria yang menunjukkan kinerja keuangan sebagai penentu kelayakan daerah dalam menerima dana insentif daerah (Keuda Kemendagri, 2013). Selain itu, Pemerintah Pusat akan memperkenankan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP dua kali berturut-turut untuk menerbitkan obligasi daerah sebagai penerimaan pembiayaan (Muttaqin, 2015).

Capaian opini WTP sudah di targetkan dalam RPJMN tahun 2014-2019 bidang tata kelola dan reformasi birokrasi. Target yang telah ditetapkan dalam RPJMN untuk pemerintah daerah yaitu rata-rata nasional capaian opini WTP untuk kabupaten sebesar 60% dan kota sebesar 65%. Target opini WTP dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah setelah diterapkannya SAP berbasis akrual. Salah satunya ditunjukkan pada Provinsi Jawa Tengah terjadi tren peningkatan setelah diterapkannya SAP berbasis akrual sebesar 40% pada tahun anggaran 2015. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangan (Andryanto, 2017). Capaian opini WTP merupakan cerminan akuntabilitas yang menjadi langkah untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Capaian opini WTP Provinsi Jawa Tengah meningkat di tahun anggaran 2016 namun masih terdapat 5 kabupaten yang mendapatkan opini WDP. Terdapat 2

kabupaten dari 5 kabupaten yang mendapat opini WDP mengalami penurunan opini dari WTP ke WDP yaitu kabupaten kebumen dan klaten. Permasalahan ini disebabkan terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria dalam penilaian opini. Hal ini memungkinkan Pemerintah Daerah lain mengalami penurunan opini.

Penelitian mengenai mempertahankan opini WTP diantaranya dilakukan oleh Muttaqin (2015), menjelaskan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam menerapkan SAP berbasis akrual sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 dan merancang strategi untuk memperoleh opini WTP. Hal tersebut sama seperti penelitian Setyawati (2017) menjelaskan strategi dalam memperoleh opini WTP atas pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso yang dirumuskan dengan menggunakan analisis IFAS dan EFAS. Dalam mempertahankan opini WTP terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh Vidiyana (2016) menjelaskan peran inspektorat dalam membantu Pemerintah Daerah Kota Surakarta untuk mempertahankan opini WTP. Penelitian dari Yazied (2017) upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memperoleh dan mempertahankan opini WTP.

Atas uraian tersebut, maka peneliti ingin meneliti mengenai strategi mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerah Kota Salatiga. Hal ini disebabkan pemerintah daerah Kota Salatiga sudah memperoleh opini WTP pada tahun anggaran 2016. Pemerintah Daerah Kota Salatiga sudah mempersiapkan dalam rangka mempertahankan opini WTP dengan membuat komitmen dari pimpinan dan jajarannya dengan penandatanganan dokumen perjanjian kinerja dan mengadakan sosialisasi terkait kebijakan pemerintahan umum (Salatiga, 2017). Persiapan tersebut berbuah hasil pada tahun anggaran 2017 dapat mempertahankan opini WTP.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan (audit) keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, serta profesional yang dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditentukan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (UU Nomor 15 Tahun 2004). Proses pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada penggunaan laporan keuangan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan terpercaya.

Lembaga negara yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK bertugas sebagai auditor eksternal pemerintah. pemeriksaan keuangan negara terdiri dari beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan tujuannya. Berikut jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK, yaitu pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan keuangan.

Kriteria dalam Pemberian Opini Pada Pemeriksaan Keuangan

Pemberian opini kepada pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Semakin banyak kriteria yang terpenuhi, maka penilaian opini yang diperoleh pemerintah daerah semakin tinggi. Adapun kriteria pemberian opini pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern

Strategi Penerapan dalam Rangka Mempertahankan Opini WTP

Strategi menurut Rangkuti (2009: 36) adalah alat untuk mencapai tujuan dengan melihat secara objektif kondisi internal dan eksternal sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Strategi dapat dirancang dengan mengidentifikasi regulasi sebagai tujuan yang ingin dicapai dan mengidentifikasi kondisi saat ini. Apabila terjadi *gap* antara regulasi dan kondisi, maka strategi dapat dirancang ke langkah-langkah yang akan dilakukan (John dan Setiawan, 2009: 142). Strategi yang dikemukakan oleh Suwanda (2010: 145) tidak hanya penyusunan rencana aksi, akan tetapi disusunnya aspek-aspek pendukung lainnya. Hal ini dengan dipaparkannya 9 strategi dalam memperoleh opini WTP yaitu, Komitmen pimpinan, membentuk tim, membuat rencana aksi, menyiapkan anggaran, rancangan sistem pengendalian internal, perbaikan sistem akuntansi keuangan serta sistem informasi manajemen barang daerah, peningkatan sumber daya manusia, optimalisasi peran APIP, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus karena dirasa jenis penelitian menjelaskan suatu kondisi pemerintah daerah kota salatiga mempertahankan opini WTP. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Salatiga yang informan yang dituju sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Status Informan
1	Siswo Hartanto, SE, M.Si	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Informan Utama
2	Titin Riniwati, BA	Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah	Informan Utama
3	Ahmalud Huda, SE.	Kepala Sub Penatausahaan dan Pengamanan Badan Keuangan Daerah	Informan Utama
4	Wiji Wijaya, SE., MM	Inspektorat	Informan utama
5	Aditya Yoga SE	Staf Sub Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah	Informan tambahan
6	Azis Muslim, SE, MM	Kepala Sub Bidang Keberatan Pajak, Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Badan Keuangan Daerah	Informan tambahan
7	Agus Munazil Firdaus SE. M.Si	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pelaporan Badan Keuangan Daerah	Informan tambahan

Data pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari informan. Teknik analisis data yang digunakan yakni model analisis data dari Miles et. al. (2014) yang meliputi kondensasi, penyajian data dan penarikan

kesimpulan/verifikasi. Meningkatkan keakuratan data dalam penelitian menggunakan triangulasi data dengan menggunakan triangulasi sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Mempertahankan Opini WTP

Pemerintah Daerah Kota Salatiga menerapkan SAP berbasis akrual, opini yang diperoleh atas LKPD tahun anggaran 2015 yaitu opini WDP. Opini WDP tersebut disebabkan adanya permasalahan pada pengelolaan aset tetap di Pemerintah Daerah Kota Salatiga. Pada tahun selanjutnya, Pemerintah Daerah Kota Salatiga telah melakukan perbaikan atas pengelolaan aset tetap sehingga Pemerintah Daerah Kota Salatiga memperoleh opini WTP tahun anggaran 2016. Perubahan opini ini menunjukkan adanya perbaikan yang harus dipertahankan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga. Pemerintah Daerah Kota Salatiga berhasil menjaga kualitas laporan keuangan dengan mendapatkan opini WTP di tahun anggaran 2017. Strategi dalam mempertahankan opini WTP dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain komitmen, pengelolaan barang milik daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga hal tersebut belum mencakup semua upaya yang telah dilaksanakan oleh beberapa pihak terkait sehingga beberapa informan menambahkan strategi dalam mempertahankan opini WTP.

1. Komitmen Pimpinan beserta bawahannya

Pemerintah Daerah Kota Salatiga berupaya untuk meningkatkan komitmen dalam mempertahankan opini WTP. Komitmen merupakan janji yang dibuat untuk melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan target. Komitmen memiliki andil yang besar dan komponen utama dalam mempertahankan opini WTP. Komitmen dalam mempertahankan opini WTP ternyata tidak hanya diterapkan pada tingkat kota melainkan mengalir ke tingkat pimpinan OPD sampai ke pelaksana teknis. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah termasuk pimpinan dan bawahannya diatur dalam bentuk perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja memiliki arah vertikal, yaitu antara pimpinan dan bawahan pada setiap jenjang. Apabila perjanjian tersebut dilanggar, maka akan dilakukan evaluasi oleh pihak inspektorat. Pemerintah Daerah Kota Salatiga berupaya untuk menjaga komitmen OPD dengan memberikan jadwal yang telah ditentukan oleh BKD selaku *leading sector* pengelolaan keuangan. Pemberian jadwal sebagai upaya dalam mendukung komitmen. Penjadwalan ini diberikan setelah diterbitkan surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda).

2. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Piutang

pemerintah berusaha meningkatkan pengelolaan aset, persediaan dan piutang daerah. Ketiganya memiliki nilai yang cukup tinggi dalam neraca. Apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan laporan keuangan.

a. Pengelolaan aset tetap daerah

Aset tetap merupakan kekayaan daerah yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan dalam bentuk fasilitas sebagai penunjang urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat. Nilai aset daerah memiliki nilai paling tinggi diantara pos keuangan yang lain sehingga sering menjadi temuan BPK. Pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah

Kota Salatiga menjadi penyebab utama dalam perolehan opini WDP sampai tahun anggaran 2015. Jumlah aset tetap yang tercatat yang menjadi temuan BPK kurang lebih 90 miliar dianggap telah mencapai tingkat materialitas yang ditentukan oleh BPK. Aset tetap yang menjadi permasalahan ini meliputi pencatatan, penatausahaan, pengakuan sampai ke penghapusan. Permasalahan utama dalam aset tetap dengan munculnya catatan ada barang tidak ada (CABTA). Permasalahan CABTA sangat serius sehingga harus dilakukan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga melalui penelusuran. Penelusuran aset yang nilainya besar ini dibutuhkan strategi khusus, salah satu solusi atas permasalahan tersebut dengan membentuk tim penelusuran. Tim penelusuran ini terdiri dari inspektorat dan OPD yang terkait.

Selain itu dilakukan bagian barang milik daerah BKD melakukan pencatatan aset tanah yang diperhitungkan sebagai kekayaan daerah yang baru. Pencatatan nilai tanah diperlukan proses penelusuran yang dilakukan oleh bagian barang milik daerah dengan membentuk tim penelusuran. Dengan adanya tim penelusuran ini target dalam pencatatan nilai tanah semakin cepat dan terarah. barang milik daerah sudah menyiapkan tim penelusuran.

b. Pengelolaan Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar yang disajikan pada neraca. Nilai persediaan apabila di akumulasikan memiliki nilai yang cukup tinggi. Pemerintah Daerah Kota Salatiga melakukan tidak lanjut dari rekomendasi tersebut dengan merubah pencatatan persediaan dan penambahan aplikasi untuk pencatatan persediaan. Pencatatan akun persediaan sebelumnya menggunakan metode periodik menjadi metode perpetual. Perubahan pencatatan ini berdampak berubahnya peraturan walikota yang mengatur sistem dan kebijakan akuntansi yang sebelumnya diatur Perwali Nomor 12 Tahun 2016 dirubah dengan diterbitkannya Perwali Nomor 25 Tahun 2017. Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam membantu meningkatkan pengelolaan persediaan dengan melakukan upaya sebagai bentuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK. Pemerintah Daerah Kota Salatiga melakukan pembelian aplikasi untuk akun persediaan untuk mempermudah pencatatan dan perolehan informasi. Aplikasi persediaan yang dibeli yaitu Sistem Informasi Administrasi Persediaan (SIAP).

c. Pengelolaan Piutang

Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain meliputi pajak, retribusi dan sebagainya. menekankan pengelolaan piutang pada piutang pajak PBB dan penerimaannya. Pajak PBB diakumulasikan merupakan pajak yang besar yang digunakan sebagai pendapatan dalam bidang pajak dan retribusi. Melihat hal tersebut, BKD bidang Pendapatan mengupayakan kualitas piutang dilakukan dengan pengendalian piutang. Pengendalian piutang dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pengiriman surat tagihan untuk membayar pajak, surat teguran dan mendatangi wajib pajak yang bersangkutan. Pengelolaan piutang yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Salatiga saat ini masih bersifat persuasif. Pemerintah Daerah Kota Salatiga melaksanakan tindakan terakhir dengan cara melakukan penghapusan, apabila wajib pajak

tidak membayar pajak PBB selama beberapa tahun. Penghapusan dilakukan bagi umur piutang yang sudah lima tahun lebih dan tidak tertagih.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah Kota Salatiga untuk mempertahankan opini WTP disamping rencana aksi yang telah disusun diperlukan sumber daya manusia yang memadai. Kualitas sumber daya manusia menjadi sorotan Pemerintah Daerah sejak menghadapi persiapan penerapan berbasis akrual. Langkah awal yang dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk menghadapi penggunaan akuntansi berbasis akrual dengan cara melakukan rekrutmen. Pengelola keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi sudah tersedia di seluruh OPD. Ketersediaan ini dilakukan dengan cara *mapping* pengelola keuangan ke seluruh OPD yang ada di Pemerintah Daerah Kota Salatiga. Pengelola keuangan berasal dari latar belakang pendidikan masih berbeda-beda. Hal ini akan menjadi permasalahan yang akan terjadi dalam tingkat pemahaman sehingga BKD mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola keuangan dengan berbagai macam cara yaitu sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, karantina, studi banding.

4. Pembentukan Tim

Pemerintah Daerah Kota Salatiga telah membuat tim untuk meningkatkan penyajian laporan keuangan. Pembentukan tim atas hasil rekomendasi oleh BPK dilakukan agar penyusunan dilaksanakan secara tertib, lancar, dan berdaya guna. Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga terdiri dari tim penyusunan laporan keuangan dan tim pembahas. Tim ini melibatkan beberapa pihak tidak hanya BKD sebagai koordinator dalam pengelolaan keuangan, tetapi melibatkan OPD lainnya. Dua tim tersebut masih di *breakdown* lagi menjadi tim penyusunan pra pemeriksaan dan paska pemeriksaan serta tim pembahas pra pemeriksaan dan paska pemeriksaan.

5. Peningkatan Teknologi Informasi

Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual juga didukung dengan adanya teknologi informasi yang memadai baik dari segi sistem informasi maupun aplikasi. Teknologi informasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga untuk membantu mengelola keuangan daerah. Aplikasi utama yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Selain itu terdapat aplikasi pendukung lainnya yang *server* induknya yakni *advance* terdiri dari 3 USB sub. USB sub ini terbagi menjadi tiga sistem, yaitu Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA), Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Administrasi Persediaan (SIAP). Selama pelaksanaan menggunakan aplikasi masih ditemukan ketidaksempurnaan sehingga diperlukan pengembangan terutama pada aplikasi SIAP yang baru dibeli pada akhir tahun 2017 sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Peningkatan teknologi informasi yang sudah ada akan berdampak pada pengelolaan keuangan terutama dalam bidang aset. Selain itu diperlukan pembinaan untuk pelaksana teknis OPD terkait pengelolaan persediaan maupun aset tetap, sehingga sistem dapat digunakan secara optimal.

Harapannya aplikasi ini dapat mendukung pengelolaan keuangan secara baik dan dapat terintegrasi.

6. Peningkatan Peran Inspektorat sebagai Auditor Internal

Inspektorat termasuk dalam tim penyusunan laporan keuangan pra pemeriksaan, sehingga berperan dalam menilai kualitas laporan keuangan OPD selama pelaksanaannya. Dalam upaya mempertahankan opini WTP, Inspektorat memiliki peran setelah LKPD diperiksa oleh BPK. Adapun peran inspektorat dalam bentuk pengawasan intern untuk membantu dalam mempertahankan opini WTP sebagai yaitu Reviu atas LKPD, Pendampingan OPD atas tindak lanjut temuan, Melaksanakan audit fokus, Melaksanakan layanan konsultasi kepada OPD

Kendala dalam Mempertahankan Opini WTP

Strategi yang telah dirancang tidak sepenuhnya sesuai selama pelaksanaan. Seringkali dalam pelaksanaannya diiringi berbagai kendala. Kendala ini dialami pada saat menjalankan strategi dalam mempertahankan opini WTP karena terdapat rencana yang tidak sesuai selama pelaksanaan dikarenakan kondisi tertentu. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga selama pelaksanaan mempertahankan opini WTP sebagai berikut:

1. Mutasi Jabatan

Mutasi merupakan fenomena yang sering terjadi dalam Pemerintah Daerah dalam bentuk perubahan posisi jabatan. Mutasi ini memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Mutasi jabatan pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh kepala daerah yang dibantu oleh badan kepegawaian dan panitia seleksi. Akan tetapi, mutasi ini tidak berujung pada peningkatan kualitas bagi sektor tertentu salah satunya dalam pengelola keuangan meliputi penyusun laporan keuangan, pengurus barang, pengurus barang persediaan. permasalahan mutasi dan SOTK ini menjadi kendala selama pelaksanaan pengelolaan keuangan. Permasalahan mutasi pejabat ditekankan pada perpindahan kedudukan sebelumnya ke kedudukan yang baru. Beberapa informan merasa ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan pejabat dengan kedudukan yang ditempati sehingga diperlukan pelatihan sumber daya manusianya. Pelatihan sumber daya manusia diperuntukkan bagi para pejabat yang baru. Pelatihan tersebut diiringi proses pembelajaran sehingga menyebabkan penyerahan laporan keuangan menjadi terhambat. Hal ini dikarenakan pada saat proses pembelajaran bagi para pejabat baru dalam pengelolaan keuangan memerlukan waktu yang lama disebabkan aturan-aturan dalam pengelolaan keuangan cukup banyak.

2. Aplikasi SIAP yang Belum Optimal

Aplikasi SIAP merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan persediaan daerah. Pemerintah Daerah Kota Salatiga menerapkan aplikasi ini atas rekomendasi dari BPK untuk perbaikan pengelolaan persediaan tahun anggaran 2016. Pembelian aplikasi SIAP ini pada akhir tahun 2017 dan aplikasi SIAP baru digunakan saat memasuki tahun 2018 dalam kurung waktu selama 2 bulan. Aplikasi yang masih baru ini penggunaannya belum optimal dan terdapat permasalahan. Permasalahan aplikasi SIAP masih terdapat *double entry* berdasarkan sistemnya. Kendala yang cukup terlihat pada pencatatan pemakaian persediaan. Pelaksana teknis mengharapkan persediaan ini akan dapat terintegritas secara sistematis.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemerintah Daerah Kota Salatiga menjalankan urusan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi. Selama pelaksanaan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh walikota sebagai kepala daerah dan dibantu perangkat daerah. Perangkat daerah di kota salatiga terdiri atas 33 OPD. Perangkat daerah yang sudah terbagi sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat menjalankan urusan pemerintahan didukung dengan dana. Dana yang diberikan terbatas sehingga diperlukan pengelolaan keuangan. Keuangan Pemerintah Daerah harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Hal ini menyebabkan Pemerintah Daerah membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan keuangan yang diterbitkan Pemerintah Daerah digunakan untuk pengambilan keputusan sehingga harus wajar dan berkualitas. Akuntabilitas kewajaran laporan keuangan diperkuat melalui opini audit. Pemerintah Daerah Kota Salatiga menargetkan opini WTP sebagai penilaian tertinggi. Adapun strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah kota salatiga dalam mempertahankan opini WTP: Pertama komitmen pimpinan beserta bawahan sebagai komponen utama. Kedua, peningkatan pengelolaan barang milik daerah dan piutang. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keempat, Pembentukan tim penyusun laporan keuangan. Kelima, peningkatan teknologi informasi. Keenam, meningkatkan peran inspektorat sebagai auditor internal. Selama pelaksanaan ada kendala yang sering ditemui dalam mempertahankan opini WTP yaitu mutasi jabatan dan aplikasi SIAP yang belum optimal.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan. Pada saat penelitian dilakukan di bulan April, pada pemerintah daerah kota salatiga di bulan yang sama terjadi perpindahan pejabat. Perpindahan pejabat ini, menyebabkan informan dalam memberikan informasi tidak secara menyeluruh dan merasa kurang menguasai bidang lainnya.

Waktu penelitian yang kurang tepat, hal ini disebabkan pada bulan April dilaksanakan audit rinci oleh BPK. Kondisi ini menyebabkan peneliti dalam memperoleh informasi yang seharusnya kepala bagian dialihkan pada kepala sub bagian bidang barang milik daerah.

Saran Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi peneliti yang telah dijabarkan sebelumnya, lebih baik penelitian sejenis dilakukan sebelum bulan April. Hal ini disebabkan pada bulan April pasti dilakukan audit rinci oleh BPK sehingga ketersediaan waktu informan terbatas. Kemudian, sebelum penelitian telah memastikan kapan terakhir kali perpindahan pejabat sehingga dapat dipersiapkan informan yang dituju.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrarudin dan Evy Kurniati. (2016). Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pemerintahan Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. *ASSETS: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 6(2), 147-161.
- Andryanto, Yayan. (2017). *Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (Tesis, Universitas Lampung, Indonesia). Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/25501/>.
- Bastian, Indra. (2006). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Budiman, Rizal Y, Jullie J., & Sondakh Winston Pontoh. (2015). Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh Anggota Tim Yunior Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 10(1), 12-21.
- John, M. Yusif dan Dwi Setiawan. (2009). *Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*. Diakses dari <http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=50077>
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman & Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Edisi 3).
- Muttaqin, Riza. (2015). Upaya Penerapan Akrua dan Perolehan Opini WTP di Kota Pekalongan dari Kacamata Kurt Lewin. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 19(4), 516-536.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Diakses dari https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2014/02/Permendagri-Nomor-64-Tahun-2013_243_1.pdf
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Diakses dari <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>
- Puspitaningtiyas, Raden Ajeng R. (2017). *Analisis Penatausahaan Aset Tetap (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Batang)* (Tesis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia). Diakses <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/128489/potongan/S2-2017-391668-title.pdf>.
- Setyawati, Heny. (2017). Strategi Pencapaian Opini WTP Pemerintah Kabupaten Bondowoso Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *Bisma (Jurnal Bisnis dan Manajemen) Universitas Jember*, 11(3), 350-365.

Suwanda, Dadang. (2013). *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*. Jakarta: Penerbit PPM.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Diakses dari <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU15-2004PemeriksaanKeuangan.pdf>.

Vidiyana, Fransiska. (2016). *Peranan Inspektorat Daerah Dalam Membantu Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta* (Tesis, Universitas Gajah Mada, Indonesia). Diakses dari http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=106060&obyek_id=4.

Yazied, Naufal. (2017). *Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Memperoleh dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang Diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan* (Tesis tidak dipublikasikan). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.